

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Abdul Latif fan Hasbih. Politik Hukum dalam Sketsa. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelititan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Prenada media Group, 2008.
- Bakhri, Syaiful. Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- J.E. Sahetapy. Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung: Eresco, 1995.
- Marpaung, Laden. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Pradanamedina, 2016.
- Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto. Hukum Pidana I Cetakan II. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Wisnubroto, Aloysius. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

B. Internet

- Kabar Bisnis, “Presiden Jokowi Teken Perpres BPOM”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170814/15/680788/presiden-jokowi-teken-perpres-bpom>, diakses pada 7 Mei 2018.
- Kumparan, “BBPOM Semarang Grebek Distributor Jamu Tak Berizin Edar di Tegal”, <https://kumparan.com/panturapost/bbpom-semarang-gerebek-distributor-jamu-tak-berizin-edar-di-tegal> diakses pada tanggal 3 Mei 2018.
- Media Jateng, “Peredaran Obat dan Jamu Tanpa Izin Edar Dibongkar oleh Ditresnarkoba Polda Jateng”, <http://mediajateng.net/2017/03/09/peredaran-obat-dan-jamu-tanpa-ijin-edar-dibongkar-oleh-ditresnarkoba-polda-jateng/8388/>, diakses tanggal 7 April 2018.
- Republika, “Jokowi Ingin BPOM Diperkuat dengan UU”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/03/ox8j1a368-jokowi-ingin-bpom-diperkuat-dengan-uu>, diakses pada 7 Mei 2018.
- Tribun News, “BBPOM Kota Semarang Musnahkan Obat Ilegal”, <http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/28/bbpom-kota-semarang-musnahkan-obat-ilegal> diakses pada tanggal 8 April 2018.

C. Jurnal

- Basuki, Udiyo. Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Vol 13 No. 2 Oktober 2017.

D. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 Tentang Kriteria Tata Laksana Registrasi Obat;
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010 Tahun 2008 Tentang Registrasi Obat
- Keputusan Kepala Badan POM No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

E. Tesis

Sari, Indah Kurnia. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Sediaan Farmasi Obat. Tesis. 2017.